

## ABSTRACT

Electronic cigarettes or better known as *vape* is a trend in society, especially for millennials along with the introduction of *vape* it selfs which is promoted as a new innovation of healthier and safer way of smoking. The popularity of *vape* has been growing so rapidly, within a relatively short period of time that has been able to attract the number of smokers who are trying to change from conventional cigarette to e-cigarettes or *vape*. The developments led the growth of the existence of *vape* store and the emergence of *vape* liquid maker entrepreneurs or better known as brewer. The absence of regulation had made misused *vape* as a medium for the spread of drugs and in some cases, *vape* has been consumed by minors. The government through the ministry of finance finally issued policy PMK-146/PMK.010/2017 concerning on excise tariffs on tobacco product as a response of the government intervention to be involved in the regulation and supervisions of *vape* distribution. This study wants to find out the policy implementation process of PMK-146/PMK.010/2017, especially imposition of excise on *vape* liquids. This research was conducted in Yogyakarta, using qualitative descriptive methods with case study approach. Data collection techniques are carried out by observation, literature study, and interviews with related sources.

The result of the study uses implementation of analysis framework from Merilee S. Grindle. This study found out that the imposition of excise on *vape* liquids encourages the creation of supportive climate of business competition among *vape* store entrepreneurs with role of KPPBC TMP B Yogyakarta in the fields of licensing and supervision. However, in the process of implementation of the policy, there are still obstacles originating from the local government regarding of the issuance of business licenses which resulted delays for *vape* store entrepreneurs on managing licenses of excise.

**Keywords:** *electronic cigarettes or vape, policy implementation, excise, KPPBC TMP Yogyakarta*

## ABSTRAK

Rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan *vape* menjadi tren di masyarakat, khususnya bagi kaum generasi millennial seiring dengan pengenalan *vape* yang dipromosikan sebagai inovasi baru dari cara merokok yang lebih sehat dan aman. Popularitas *vape* berkembang begitu pesat, dalam jangka waktu yang tergolong singkat mampu menarik jumlah perokok yang kini mulai beralih menggunakan *vape*. Perkembangan tersebut mendorong tumbuhnya keberadaan *vapestore* dan munculnya pengusaha peracik *liquid* atau cairan *vape*, yang lebih dikenal dengan *brewer*. Ketiadaan regulasi sempat membuat *vape* disalahgunakan sebagai media penyebaran narkoba, dan dalam beberapa kasus dikonsumsi oleh anak dibawah umur. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pada akhirnya mengeluarkan PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, sebagai jawaban atas campur tangan pemerintah untuk terlibat dalam pengaturan serta pengawasan *vape*. Penelitian ini hendak mengetahui proses implementasi kebijakan PMK-146/PMK.010/2017, khususnya terhadap pengenaan cukai pada cairan *vape*. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi observasi, studi literatur dan wawancara terhadap narasumber terkait.

Hasil dari penelitian ini, menggunakan kerangka analisis implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, ditemukan bahwa pengenaan cukai terhadap cairan *vape* mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat antar para pengusaha *vape* dengan adanya peran dari KPPBC TMP B Yogyakarta dalam bidang perizinan serta pengawasan. Namun, dalam proses implementasi kebijakan masih terdapat hambatan yang berasal dari pemerintah daerah terkait tentang penerbitan surat izin usaha, yang berakibat pada keterlambatan para pengusaha *vape* dalam mengurus perizinan cukai.

**Kata kunci : rokok elektrik atau vape, implementasi kebijakan, cukai, KPPBC TMP Yogyakarta**